



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Kepada Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

di

Jakarta

Sehubungan dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju (WBK/WBBM) dan pengusulan (nama unit/satuan kerja) tahun 2024, dengan ini kami sampaikan rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN sebagai berikut:

REKAPITULASI PENYAMPAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)

DI PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TAHUN 2023

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara	
	a. Wajib LHKPN	19
	b. Tidak Wajib LHKPN	3
2	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	19
3	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	-
4	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	3
5	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	-
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	-

Demikian rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi

Sigit Purnomo



Digital Signature
mk2050901887240710091227